



JKB

Jurnal Kewirausahaan & Bisnis

Volume 3 Issue 2, 2021 (143-148)

ISSN (online) : 3026-0167

Homepage : <https://jurnalunived.com/index.php/JKB>

Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Bajak II Dalam Pelayanan Publik Era Digital Governance

Desita Rahayu¹, Sances Harry Pratama², Salma Safitri³, Oty Ferta⁴, Clara Ecclesia⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial/Jurusan Administrai Publik, Universitas Dehasen Bengkulu, Indonesia

¹ e-mail: desitanashattar@gmail.com

Abstract. Times are advancing, demands are increasing, Village officials as the frontline as the lowest implementers of development really need to increase human resources in order to be able to adapt and be able to keep up with the times so that public services at the Village level in the digital era are better and more improved. In this case, there are two challenges to public services in Bajak II Village, namely infrastructure challenges, namely digital infrastructure that can support public services, including the availability of an adequate internet network, a Village information menu that is easy to access. The next challenge is human resources, namely the literacy skills of residents in utilizing social media, digital media to access various information and public services. In the process of increasing human resource capacity carried out by the Temon Village government, although there are many obstacles, many efforts have been made to increase the human resource capacity of the Bajak Village Apparatus. Concrete steps taken by the Bajak Village government are participating in and organizing various trainings and technical guidance in accordance with applicable laws and regulations, organizing the improvement of MSMEs, creating a Village website. In order to increase the capacity of village officials in public services, special attention needs to be paid, because it has become a demand with the rotation of the development of an increasingly advanced era, to be able to improve public services in the digital era, it is very necessary to increase human resources and other support resources, such as tools and internet networks to access all information on social media.

Keywords: *Capacity of Village Officials, Services, Digital Era*

Abstrak. Zaman semakin maju, tuntutan semakin banyak, perangkat Desa sebagai garda terdepan sebagai pelaksana Pembangunan paling bawah sangat perlu peningkatan SDM agar mampu beradaptasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga pelayanan public ditingkat Desa di era digital lebih baik dan lebih meningkat. Dalam hal ini terdapat dua tantangan pelayanan publik di Desa Bajak II yaitu tantangan infrastruktur yaitu infrastruktur digital yang dapat mendukung pelayanan public, di antaranya ketersediaan jaringan internet yang cukup memadai, menu informasi Desa yang mudah di akses. Tantangan berikutnya adalah SDM, yaitu kemampuan literasi warga dalam memanfaatkan media sosial, media digital untuk mengakses berbagai informasi dan pelayanan publik. Dalam proses peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah Desa Temon sudah baik walaupun banyak kendala, akan tetapi banyak usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa Bajak. Langkah - langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Desa Bajak adalah mengikuti serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan peningkatan UMKM, membuat web Desa. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian khusus, karena sudah menjadi sebuah tuntutan dengan perputaran perkembangan zaman yang semakin maju, Untuk bisa meningkatkan

pelayanan publik di era digital sangat dibutuhkan peningkatan SDM dan Sumber Daya Dukung lainnya, seperti alat dan jaringan internet untuk mengakses semua informasi di media sosial.

Kata Kunci: *Kapasitas Perangkat Desa, Pelayanan, Era Digital*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini hampir semua sektor dituntut untuk menerapkan sistem digitalisasi termasuk dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi merupakan satu kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan dunia industri. Berbagai bentuk digitalisasi sangat memudahkan setiap pekerjaan. (Araujo, Priadana, S., Paramarta, & Sunarsi, 2021) Sederhananya digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Tujuan digitalisasi tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin. (Verihubs, 2022) Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi merupakan proses media dari bentuk tercetak, audio, atau video menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia*, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Manfaat digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarkan informasi, dengan begitu masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. (Wiranti & Frinaldi, 2023) Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga sangat dibutuhkannya penyesuaian terhadap teknologi demi menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai pemberi layanan dalam masyarakat juga harus mampu memanfaatkan teknologi demi menunjang kegiatan partisipasi. (Abd Aziz, Ab Rahman, & Alam, M. M., & Said, 2015) Digitalisasi yang telah masuk ke kehidupan sehari-hari juga banyak dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan saat ini dengan mempermudah memberikan partisipasi yang bisa kita lihat di berbagai aplikasi mulai dari pengantar makanan, ojek, pesan antar barang dan jasa juga telah banyak memanfaatkan kemajuan (Aliamsyah, 2009) Manusia sebagai pengguna pasti ingin sesuatu yang mempermudah segala kegiatan, semua hal di coba untuk mengoptimalkan waktu dan tenaga. Head of Strategy and Planning PHD Asia Pacific, menjelaskan lima tahap evolusi teknologi masa depan yang tumpang tindih. Tahapan perubahan muncul, mengorganisir, mengekstraksi, mengantisipasi dan mengangkat. Selama era pengembangan, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1995, informasi diperoleh melalui komputer yang terhubung ke internet (Littlejohn, 2014) Pada tahap kedua, yang dikenal sebagai *Organize* (1990-2015), pengguna teknologi mengorganisir materi dari Internet yang dapat diakses di seluruh dunia dan 3 memiliki nilai tambah yang luas.

Fase *Unbundling*, yang berlangsung dari tahun 2010-2025, ditandai dengan penggunaan gadget pintar, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan asisten virtual untuk mempercepat komunikasi global. Pada tahap keempat, yang dijuluki *Foresight* (2020-2035), sistem kecerdasan buatan dapat belajar lebih dalam dan memahami keinginan masyarakat. Pengenalan teknologi yang mendukung kecerdasan buatan yang dapat mengubah cara orang berinteraksi akan menentukan fase kelima, yang dijuluki *Lifting* 2030-2050 (Reza, 2017) Banyak profesi yang berbeda dipengaruhi oleh teknologi, dan beberapa pekerjaan akan tergantikan. Sembilan pekerjaan, termasuk pengemudi, petani, penerbit/cetak, agen perjalanan, kasir, pegawai bank, telemarketer, akuntan, dan pialang saham, diprediksi akan gulung tikar di masa (Astomo, 2014) Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan administrasi kantor di lembaga pemerintahan, Karena teknologi selalu berubah dan bahkan revolusioner, kantor harus terus beradaptasi dan menggunakannya. Paradigma partisipasi publik sedang berubah, dengan

menempatkan lebih banyak fokus pada manajemen yang berfokus pada pelanggan (pemerintah yang digerakkan oleh kebutuhan warganya), yang sejalan dengan evolusi administrasi negara untuk mencapai partisipasi yang baik dan berkualitas tinggi. Tindakan memberikan kenyamanan dan layanan kepada masyarakat dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya demi efektivitas, efisiensi, dan 4 pemangkasan biaya (Suwondo, 2011) Partisipasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang prima karena tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan harus bisa secara cepat, efektif dan efisien. Seorang birokrasi harus memiliki jiwa melayani dengan cara kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi dialogis serta cara kerja yang lebih pragmatis dan realistis, yang Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa "Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional" (RI, 2009) Sementara di Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non elektronik yang sekurang kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja. Secara eksplisit terhadap topik partisipasi publik di dalam kebijakan, khususnya pada diskusi tentang elemen pendorong partisipasi tersebut. (Damanik, 2016) Selain karena pembahasan partisipasi masyarakat yang masih terfragmentasi, sebagian besar studi menempatkan partisipasi pada konteks peran warga sebagai salah satu pihak yang mampu mengimplementasikan kebijakan. Keadaan ini mengasumsikan bahwa partisipasi telah terbentuk secara final dan belum mengeksplorasi lebih jauh adanya ragam permasalahan pada tataran hulu seperti aksesibilitas 5 ataupun aspek sumber daya pendukung partisipasi. Padahal pemahaman mengenai partisipasi sendiri berkaitan erat dengan isu redistribusi kuasa kepada warga agar mampu secara aktif terlibat dalam setiap proses kebijakan sesuai dengan basis kebutuhan mereka. (Lim, Edelenbos, & Gianoli, 2019). Kebutuhan untuk terus mengangkat isu partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan perkotaan sangat diperlukan karena kota bukanlah ruang mati yang hanya disusun oleh infrastruktur fisik saja. Keberadaan kota sangat terikat oleh sekelompok individu yang bermukim, mendiami, serta beraktivitas di dalamnya yang menciptakan nilai-nilai serta interaksi antarmanusia (Suntoro & Hariri, 2015).

Mengarusutamakan diskursus partisipasi publik artinya memberikan upaya pada terbentuknya ruang kota yang lebih inklusif serta menghindari tercerabutnya kepentingan organik masing-masing penduduknya. Partisipasi membuka kemungkinan bagi warga untuk mendobrak dominasi kapital dari proses industrialisasi yang bergeliat di kota (Haliim, 2016) Setiap penghuni kota mulai dari lingkup individu berkesempatan untuk mendefinisikan ulang bentuk perjuangan atas produksi ruang kota berdasarkan kebutuhan bersama. Pengamatan dinamika partisipasi publik dapat dijadikan pintu masuk untuk menelisik persoalan sistematis yang menjangkiti upaya partisipasi itu sendiri, baik dari aspek ketimpangan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun kapasitas politik pemerintah dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan yang bersifat kolaboratif (Butler, 2012) 6 Teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar layanan, partisipasi publik secara digital bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun layanan secara cepat sehingga mampu untuk menciptakan kualitas layanan yang unggul. (Nurhakim, 2014) Pemerintah dapat menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi partisipasi publik, memperluas keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan menerapkan egovernment, mempromosikan keterampilan digital karyawan, dan menggabungkan teknologi ke dalam prosedur pengambilan keputusan, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan digital mereka (Sawitri, 2017). Bentuk partisipasi yang telah disinggung sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam partisipasi pasif yang seolah-olah

melibatkan peran masyarakat dalam tata kelola kota, namun ternyata tidak memberikan dampak apapun pada perubahan strategis kebijakan (Gao, Z., Wang, S., & Gu, 2020). Khususnya untuk permasalahan fundamental tata kelola, seperti kemacetan, tingkat polusi udara, bencana banjir, ataupun aksesibilitas hunian (Li, Wang, Luo, & Li, 2018). Pada dasarnya, memberi kemungkinan bagi warga untuk dapat mengumpulkan data publik melalui bantuan teknologi tidak serta merta membuat mereka dapat bertindak secara bermakna atas data tersebut (Lim et al., 2019). Teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan 7 standar layanan, dengan adanya digitalisasi bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi ataupun layanan secara cepat sehingga mampu menciptakan kualitas layanan yang lebih unggul. Dengan pengaruh digitalisasi pemerintah dapat menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperluas keterlibatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara melalui digitalisasi. Serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengintegrasikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara di era digital. Perangkat Desa berfungsi memberikan pelayanan masyarakat antara lain ialah menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, dan memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Di dalam memberikan pelayanan, Perangkat Desa kepada masyarakat masih terlihat banyak keluhan dari masyarakat. kecakapan dalam memberikan pelayanan adalah bagian dari masalah yang ditunjukkan di lapangan di antaranya tidak maksimal dan optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa. Kapasitas Perangkat Desa Temon dalam pelayanan publik dapat ditinjau dari tingkat pendidikan, peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan kapasitas perangkat, kemampuan dalam mengikuti regulasi Desa, kemampuan 8 dasar dalam memahami tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan tinjauan itu dapat di sampaikan bahwa dari 15 perangkat Desa terdapat 3 yang kualifikasi pendidikannya S1, sedangkan yang lain Tingkat SLTA. Dari sini dapat dipahami bahwa secara Pendidikan masih sangat terbatas. Dilihat dari sisi pelatihan, di Desa juga sangat minim adanya pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas perangkat Desa, dalam hal pemahaman regulasi Desa juga tidak semuanya mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan, sehingga dalam berbagai hal hanya di handle oleh beberapa perangkat saja, apalagi yang terkait dengan digitalisasi (Triyono, sekdes Desa temon, 2024)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan dengan:

1. Teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung obyek penelitian dengan cara mencatat segala gejala yang di temukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. sebelum turun kelapangan peneliti menyusun pedoman obsevasi.
2. Teknik wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.
3. Teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumtasi-dokumentasi yang ada dilokasi penelitian atau sumber lain yang terkait dengan obyek penelitian.sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu Menyusun pedoman dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlunya Peningkatan SDM Secara teori dengan begitu pesatnya perkembangan zaman ini aparat pemerintah Desa dipandang sangat penting untuk meningkatkan SDM bahkan menjadi sebuah keharusan, agar aparat pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Persoalan yang terjadi dapat diidentifikasi, lemahnya dan terbatasnya kapasitas sumber daya aparat yang mampu mengelola manajemen pemerintahan Desa dalam mendukung peningkatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Semestinya penggunaan dana Desa untuk peningkatan SDM aparat Desa dapat menjadi wacana dan pemikiran Desa agar lebih maju. Banyak sekali bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop serta bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan SDM aparat pemerintah Desa. Hasilnya, kegiatan 22 ini sangat memberikan dampak positif yang signifikan serta dapat meningkatkan dan mengembangkan SDM aparat pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Temon di dapat informasi bahwa sudah ada progres kegiatan yang fokus pada aspek peningkatan kapasitas dalam pelayanan publik, beberapa hal yang telah dilaksanakan diantaranya adalah : a. Mengikuti dan menyelenggarakan pelatihan dan bimtek sesuai dengan tupoksi perangkat desa yang telah ditentukan berdasarkan peraturan per undang-undangan. b. Mengikuti program Desa Digital (Smart Village) c. Mengikuti kegiatan Paralegal se kecamatan Sawoo d. Melaksanakan publikasi kegiatan Desa

Berikutnya ialah Tantangan Pelayanan Publik di Era Digital, Ide ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi untuk mempercepat pemberian layanan publik kepada masyarakat. Mal pelayanan digital ini memberikan segala layanan administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan Kartu Tanda 23 Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, hingga Akta Kematian. Dengan layanan digital ini, pemerintah dapat menghemat 50% waktu pelayanan dan 50% anggaran layanan publik. Berdasarkan hasil observasi di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo, pelayanan publik yang berbasis digital masih sangat minim, ini terbukti dengan adanya pelayanan Masyarakat dalam urusan surat menyurat maupun urusan lain masih berbasis kertas, Masyarakat masih harus datang ke balai desa untuk mengurus segala administrasi, karena belum adanya pemanfaatan digitalisasi. Begitu juga dengan pelayanan yang lain seperti bentuk undangan juga masih berbasis kertas. Walaupun demikian untuk urusan pemerintahan dengan atasan (Kecamatan,kabupaten) sudah mulai menggunakan media digital sesuai arahan dari pemerintah tersebut. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan kasi pelayanan diperoleh informasi bahwa memang pelayanan public secara menyeluruh belum maksimal, hal tersebut dikarenakan banyaknya tantangan yang ada di Desa ini. Beberapa tantangan yang terdapat di Tesa Temon antara lain : Tantangan infrastruktur yaitu tantangan dimana pemerintah dalam membangun pelayanan publik berbasis digital adalah infrastruktur digital yang bisa mendukung pelayanan public, diantaranya adalah Ketersediaan internet cepat merupakan aspek krusial untuk 24 memastikan layanan digital Literasi warga, Tantangan kedua adalah bahwa pemerintah Desa Temon masih memiliki pekerjaan rumah terkait dengan literasi digital masyarakat. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber, yang bisa diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Sementara itu Masyarakat belum mampu mengakses berbagai informasi di Desa melalui media sosial, segala sesuatu yang terkait dengan desa biasanya masih berdasarkan informasi saat ada rapat atau sosialisasi di balai desa. Dengan demikian jelaslah tantangan pelayanan publik dengan digitalisasi membutuhkan seperangkat peralatan digital dengan berbagai komponennya, termasuk SDM dan alat seperti jaringan internet dan lain-lain,

Kemampuan SDM masih kurang mumpuni d. Daya dukung pelaksanaan Desa digital masih kurang mencukupi, Pelaksanaan pelayanan digital masih belum bisa optimal.

Proses Peningkatan Kapasitas SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional. Tanpa adanya SDM berkualitas, banyak aspek pembangunan akan terhambat. Misalnya, tidak ada SDM yang bagus untuk mengembangkan teknologi dalam negeri, padahal itu sangat penting di era teknologi Industri 4.0. Dalam rangka meningkatkan SDM yang unggul di Indonesia, terdapat 25 beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM tersebut, antara lain yaitu : Melakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh terutama kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building) melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, serta pembinaan sehingga tercipta tenaga kerja yang profesional dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian khusus, karena sudah menjadi sebuah tuntutan dengan perputaran perkembangan zaman yang semakin maju. Untuk bisa meningkatkan pelayanan publik di era digital sangat dibutuhkan peningkatan SDM dan Sumber Daya Dukung lainnya, seperti alat dan jaringan internet untuk mengakses semua informasi di media sosial. Pemerintah Desa Bajak sudah melakukan Upaya-upaya peningkatan kapasitas perangkat desa walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya akan tetapi walaupun demikian pemerintah Desa Bajak masih terus berupaya meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Adapun beberapa upaya peningkatan kapasitas perangkat Desa Bajak yang telah dilakukan adalah terus mengikuti perkembangan informasi, selalu koordinasi antar desa dan melakukan peningkatan SDM baik secara mandiri maupun berkelompok sesuai tupoksi perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., Alam, M. M., & Said, J. (2019). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. *Journal Procedia Economics and Finance* Volume 28, 2015, from : <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/viewFile/24833/11640>
- Aliamsyah, M. (2019). Pemanfaatan Sistem Informasi Bagi Perancang Peraturan Perundang- Udangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Andrianto, N. (2017). *Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Anugerah Yuka Asmara, A. Y. S. R. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*.
- Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D. (2021). Digital leadership in business organizations. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 2(1).
- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Butler, C. (2019). *Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and The Right to The City*. London: Routledge.
- Damanik, M. P. (2016). Kerangka Kerja Pengembangan Konsultasi Publik Elektronik Di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5(2).